

Pelecehan dan Kesewenang-wenangan Berbahasa

Plesetan dalam Kajian Bahasa dan Politik di Indonesia

Ariel Heryanto

Air love you ... Love you sebelum berkenang ...
Unar Kayan? Kayan goreng
Ayan goreng to school. Goreng Petruk Bagong
(Yogyakarta 1991)

Plesetan merupakan kegiatan berbahasa yang memanfaatkan sifat sewenang-wenang pada kaitan di antara kata-kata dan realitas dunia yang diacunya. Kesewenang-wenangan itu sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan. Ia menjadi bagian dari hakekat bahasa yang paling mendasar dan universal di seluruh muka bumi. Ia bukan sekedar penyelewengan yang terjadi sesekali, karena iseng, atau khas digemari orang Jawa. Karena itu plesetan sebenarnya praktek berbahasa yang jauh lebih normal dan lazim daripada yang selama ini diakui orang. Yang mencurigakan, kenyataan yang seolah-olah sangat sederhana ini tidak mendapatkan pengakuan sewajarnya dalam masyarakat pada umumnya dan kalangan ahli bahasa pada khususnya.

Yang Penting, Yang Terabaikan

Kesewenang-wenangan yang menjadi sifat kaitan di antara kata-kata dan realita di luarnya merupakan temuan Bapak Strukturalisme Eropa, Ferdinand de Saussure, pada dekade awal abad 20. Temuan itu ternyata menjadi salah satu tonggak terpenting dalam seluruh ilmu-ilmu sosial dan humaniora sepanjang abad ini. Dalam bahasa yang lebih baku di kalangan kaum strukturalis, hal itu digambarkan sebagai tidak adanya kaitan yang langsung, logis atau alamiah di antara tiga hal ini: penanda (*signifier*) -- maknanya (*signified*) -- dan realitas di dunia yang diacunya (*referent*), kecuali kaitan yang diada-adakan dan sewenang-wenang (*arbitrary*).

Tidak ada hukumnya mengapa kursi disebut 'kursi'. Atau hukum disebut 'hukum' dan bahasa dibilang 'bahasa'. Beberapa kata yang penting di Indonesia pada zaman ini seperti 'komunis', 'pribumi', 'Pancasila', atau 'Pembangunan' tidak secara langsung, obyektif, logis atau alamiah harus punya makna tertentu, apalagi menunjuk pada orang atau benda konkrit tertentu di dunia ini. Biar pun sudah banyak kita dengar sejak pertama kali belajar seluk beluk bahasa, hal tersebut masih terasa perlu dikemukakan kembali disini karena beberapa alasan berikut.

Pertama, sebagian besar gejolak sejarah umat manusia dapat dibangun dengan menyangkal kesewenang-wenangan kaitan penanda-makna-realita. Fanatisme, kecemburuan, kebencian, kemarahan, dan perang terjadi berkat atau demi tercapainya penyangkalan itu. Beberapa contoh istilah kunci pada alinea di atas sengaja dipilih untuk mengajak kita merenung betapa dahsyat dampaknya bila orang terbuai sehingga percaya bahwa seakan-akan ada kaitan yang langsung, tegas dan jelas diantara realitas dunia (termasuk, peristiwa, pikiran dan tindakan seseorang) dengan istilah-istilah tersebut. Sebaliknya betapa banyak orang lain telah dipahlawankan, diberi kuasa dan kewibawaan yang besar berkat ketahyulan yang sama atau mirip. Hanya dengan adanya kepercayaan itu, yang lama-lama dikukuhkan sekuat fosil atau monumen, pemaknaan yang berbeda dari yang sudah terlanjur lazim atau dibakukan akan dianggap kekhilafan, pelecehan, pemalsuan, atau pelesetan.

Kedua, sehubungan dengan yang pertama, plesetan hampir selalu disepelekan. Mungkin ia sesekali dihargai karena lucu dan menghibur, tetapi biasanya dianggap sebagai lelucon dan hiburan orang iseng. Maka plesetan tidak pernah mendapatkan cukup perhatian dalam agenda penelitian serius. Di antara sedikit orang yang berusaha menelitinya dengan lebih serius, plesetan diperlakukan pertama-tama sebagai kebudayaan pop dan/atau sebagai praktek budaya yang khas Jawa. Apa implikasinya?

Dianggap sebagai contoh praktek budaya pop, plesetan mungkin dihargai tetapi tetap dengan sikap defensif, protektif, berbelas-kasihan, atau romantik. Artinya, pada dasarnya plesetan dianggap sebagai penyimpangan atau sempalan dari budaya/bahasa yang 'normal'. Ketidak-normalannya boleh jadi dianggap sebagai hal terpuji atau istimewa, atau sebagai celaan/cacat. Sebagai budaya/bahasa yang dianggap khas Jawa, plesetan diteliti dalam kaitan dengan hal-hal non-bahasa yang juga dianggap menjadi khas dalam masyarakat Jawa. Misalnya sikap non-konfrontatif, tidak berterus-terang, suka humor, menjaga harmoni, dan sebagainya.¹⁾

Ketiga, tidak dapat dibantah lagi perdebatan paling penting dalam lingkungan ilmu-ilmu sosial dan humaniora secara global pada dua dekade belakangan disulut oleh wawasan post-strukturalisme dan dekonstruksi. Sedikit banyak, perdebatan ini sudah merambah kalangan intelektual Indonesia.²⁾ Hal ini perlu dikemukakan disini, sebab perdebatan itu berkaitan dengan sejarah kajian bahasa namun tidak mendapatkan perhatian selayaknya dari ilmuwan bahasa kita sendiri.

Perdebatan post-strukturalisme dan dekonstruksi beranjak dari pengkajian yang sangat radikal dan kritis terhadap seluk-beluk bahasa, khususnya kesewenang-wenangan bahasa dan ketergantungan makna pada adanya negasi, oposisi atau perbedaan di antara tanda. Anehnya, jarang sekali linguist di Indonesia dan mungkin beberapa negeri lain, yang tanggap terhadap perdebatan yang telah merombak sosok ilmu-ilmu sosial di paruh terakhir abad 20 ini. Perdebatan itu lebih banyak diikuti oleh para filosof, ilmuwan politik dan sosial, sejarawan, serta kritikus budaya dan sastra. Semua ini memberikan kesan, seakan-akan linguistik merupakan sebuah dunia sempit, terpencil dan terasing dari masyarakat zamannya, dikuasai sisa-sisa pemikiran dari abad lampau yang terpukau oleh cara kerja ilmuwan pasti dan alam dan berusaha menjiplak cara kerja disiplin itu ke dalam kajian bahasa. Seakan-akan berbagai gejolak sosial di masyarakat Orde Baru bukanlah urusan para ahli bahasa kita, selama itu tidak langsung bersangkutan-paut dengan seluk-beluk kata atau kalimat yang dipakai warga-negara Indonesia.

Ada baiknya diingat bahwa sejak di mamsa hidup Socrates di Eropa, atau pujangga-pujangga kerajaan di Asia, hingga awal abad ini para cendekiawan yang menggulati seluk-beluk bahasa tidak pernah memperlakukan bahasa terlepas dari masalah-masalah sosial, politik dan kenegaraan. Bukan hanya pada aras teori atau intelektual, tetapi juga praktek. Tidak sedikit di antara mereka yang mempertaruhkan resiko berat sebagai akibat penelitian dan karya-karya tulisnya dalam seluk-beluk bahasa. Di Eropa untuk abad ini resiko semacam itu dialami kaum Formalis Rusia, kelompok Bakhtin di Leningrad, atau kaum strukturalis di Praha. Di bawah nanti akan dicoba dibahas lebih jauh mengapa kajian bahasa tidak dapat dilepaskan dari kajian sosial.

Di Indonesia sendiri hingga pada hari ini tidak sedikit orang yang ditangkap, diadili, dipenjara karena kreativitas dan petualangannya menjelajahi kemungkinan berbahasa. Setahu saya tidak seorangpun ahli bahasa Indonesia yang secara serius ikut terlibat dalam persoalan ini. Berbagai persoalan kemasyarakatan yang serius di tanah air saat ini dianggap berada di luar bidang kebahasaan. Mungkin itu sebabnya pula hampir semua badan politik di negeri ini juga meremehkan bahasa, tidak lebih daripada sekedar alat komunikasi yang bisa diapakan saja sesuai dengan kebutuhan dan kemauan pemakainya. Bahkan Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) almarhum yang meyakini pentingnya kebudayaan dalam mewujudkan semboyan Politik adalah Panglima juga tidak lebih menghargai bahasa dibandingkan para lawannya. Padahal mereka dapat menghargai sastra, dan berbagai cabang kebudayaan lainnya sebagai suatu kekuatan sosial yang serius.

Keempat, di Indonesia saat ini perdebatan tentang post-strukturalisme dan post-moderenisme kadang-kadang dicurigai atau ditampik dengan alasan bahwa semua itu tidak relevan untuk Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang masih baru berkembang. Perbincangan tentang post-strukturalisme dan post-moderenisme dianggap sebagai kegenitan mode segelintir intelektual Indonesia yang terlalu keBarat-Baratan. Ironisnya justru pandangan yang

meremehkan Indonesia dalam perspektif evolusi sosial itu tak kalah 'Barat', khususnya Barat dari zaman kolonial.

Harus diakui tidak sedikit pembahasan tentang post-strukturalisme dan post-moderenisme yang memadamkan minat orang awam untuk ikut mendengar. Hal ini disebabkan oleh padatnya jargon dan nama asing yang disampaikan dalam susunan rumit di balik sikap angkuh pembahasnya. Sedikit banyak hal ini mengundang sinisme orang. Namun, kalau kita jujur dan adil, harus diakui pula bahwa sinisme itu sering muncul sebagai akibat kekhilafan atau ketidak-kenalan banyak orang bahwa praktek dekonstruksi dan wawasan post-strukturalisme Perancis masih berkerabat dekat dengan plesetan. Ia menjadi bagian yang universal di muka bumi ini dengan sosok, watak, dan nama yang berbeda-beda. Karena itu penting sekali bagi seorang cendekiawan Indonesia yang gemar post-strukturalisme untuk lebih banyak mengenal plesetan atau sejenisnya.

Plesetan: Pokok-pokok Maknanya

Sejarah plesetan di masa lampau masih merupakan wilayah yang gelap, paling tidak bagi saya. Walau wilayah itu layak dikuak, saya tidak akan mencoba mengerjakan hal itu dalam tulisan ini. Sebagai usaha awal dan bertaraf 'coba-coba', tulisan ini akan memusatkan perhatian pada gejala plesetan mutakhir, dan sejumlah pembahasan orang lain pada masa ini.

Pada awal tahun 1991 di Yogyakarta terjadi demam-plesetan, walau plesetan sudah dilombakan secara rutin di Universitas Gadjah Mada beberapa tahun sebelumnya (*Berita Nasional*, 1991). Dari serangkaian peristiwa di kota dan tahun-tahun itulah uraian saya akan beranjak. Akibatnya sedikit-banyak kajian ini akan kedengaran agak Jawa-sentris, tetapi ini tidak lebih dari sebuah titik-tolak dengan menggunakan sejumlah kasus. Di wilayah Yogyakarta pada awal dekade ini bukan saja produksi dan konsumsi plesetan melonjak, tetapi beberapa cendekiawan mulai serius mempertanyakan makna sosialnya.

Dalam harian lokal *Berita Nasional* kita jumpai sejumlah kolom opini tentang gejala plesetan dari sejumlah sudut-pandang. Pada tahun yang sama ketika diundang berbicara pada Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya yang kelima, Budi Susanto yang bermukim di Yogyakarta tidak dapat melepaskan bahasannya dari acuan tentang plesetan. Budi Susanto tidak secara khusus membahas plesetan dalam makalahnya. Jelas tidak dalam lingkup pengertian yang dipakai dalam uraian disini. Namun hampir seluruh acara tanya-jawab dengan hadirin sesudah penyampaian makalahnya berpusat pada soal plesetan (Susanto, 1992).

Di bawah nanti kita perlu mempertimbangkan secara lebih rinci beberapa pendapat dari pertukaran pandangan itu. Namun sebelum itu ada baiknya diperjelas dahulu apa yang dimaksud dengan istilah 'plesetan', beberapa ragamnya, serta contoh-contohnya. Sampai sekarang makna plesetan masih cukup merdeka,

lolos dari penjajahan aparatus ilmu-ilmu sosial yang dinamakan definisi dan kamus. Istilah plesetan digunakan oleh berbagai pihak dengan berbagai pengertian secara longgar. Ini tidak usah dianggap sebagai suatu kesalahan atau cacat yang perlu ditertibkan. Yang sekarang terjadi berbagai pihak masih belum merasa perlu mempertegas kategorisasi aneka makna plesetan dan memperhitungkan implikasinya secara sosial. Bila penegasan semacam itu kelak akan menjadi kebutuhan, pasti akan terjadi semacam adu pemaknaan atau definisi plesetan.

Untuk sementara kita catat saja apa berbagai pengertian yang masih hidup merdeka dan mandiri itu. Plesetan jelas berasal dari akar-kata 'p(e)leset'. Walau bahasa Indonesia merasa ikut memiliki akar-kata peleset dan beberapa kata bentukannya, istilah plesetan agaknya tidak diakui sebagai istilah resmi dalam bahasa nasional. Ia diterima sebagai kata-pinjaman dari bahasa Jawa. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia hanya dikenal makna-makna yang negatif pada berbagai istilah yang berakar dari peleset: gagal mencapai tujuan, tidak mengenai sasaran, atau terpelanting jatuh.³⁾ Plesetan yang dikenal dalam bahasa Jawa justru mengandung makna yang positif: meluncur di tempat⁴⁾ licin untuk berse- nang-senang, atau bermain-main dengan kata.

Walaupun sudah memberikan pengertian yang tepat, kamus Horne (1974) belum memberikan penjelasan cukup kepada kita yang ingin memahami seluk-beluk plesetan. Untuk keperluan bahasan disini plesetan dapat digambarkan sebagai kegiatan berbahasa yang mengutamakan atau memanfaatkan secara maksimal pembentukan berbagai pernyataan dan aneka makna yang dimungkinkan oleh sifat sewenang-wenang pada kaitan penanda-makna-realita empirik. Rumusan yang sangat umum dan abstrak ini tidak cukup jelas bila tidak diberi uraian tambahan.

Orang yang terpeleset di atas panggung atau kamar bisa mengundang tawa, asal jatuhnya tidak berakibat serius. Sebagian besar lelucon ditimbulkan oleh meleset atau terpelesetnya harapan penonton/pendengar suatu komunikasi yang diterima dari pihak lain. Harapan itu terbentuk oleh kelaziman atau pengalaman yang berulang-ulang. Harapan itu juga dirangsang oleh umpan awal yang diberikan orang yang sedang menyampaikan suatu pesan (bicara, menulis, bertindak). Seakan-akan ia sedang/akan menyampaikan atau bertindak sesuatu yang sudah lazim kita kenal. Tetapi di tengah-tengah jalannya penyampaian pesan itu tiba-tiba ada pembelokan, penyelewengan, kejutan, keterpatahan, atau kecelakaan yang tak diduga si penerima pesan.

Sebagai akibat dari pembelokan/penyelewengan/kejutan/keterpatahan/kecelakaan itu bisa timbul kelucuan, tetapi bukan tanpa resiko kemungkinan terjadinya kebingungan, kesalah-pahaman, atau juga perasaan tersinggung. Seperti kebanyakan lelucon, agar berhasil plesetan membutuhkan (a) suatu kelaziman dalam logika, harapan, praktek, atau perangkaian tanda/makna yang dikenal baik oleh penerima pesan; (b) suatu penyelewengan sebagian dari unsur-unsur kelaziman itu; dan (c) kemampuan pihak yang disapa untuk mengenali, memahami, atau menghargai adanya penyelewengan yang disengaja itu.

Variasi Plesetan dan Contohnya

Sejauh mana penyelewengan itu terjadi, dan dalam bentuk bagaimana, dapat membedakan satu jenis plesetan dari jenisnya yang lain. Paling sedikit ada tiga kelompok besar jenis plesetan yang dapat dijumpai dari kemeriahan plesetan di Yogyakarta pada tahun 1991 itu, dan mungkin dalam lingkup yang lebih luas. Saya katakan 'paling sedikit', karena saya yakin pasti ada banyak kemungkinan dan cara untuk membeda-bedakan jenis-jenis plesetan. Juga ada berbagai kemungkinan batas lingkup apa yang dapat dimasukkan sebagai plesetan dan apa yang tidak. Apa yang disajikan disini pasti bukan satu-satunya cara pembedaan variasi plesetan. Saya juga katakan bahwa paling sedikit ada tiga 'kelompok besar', karena masing-masing kelompok masih dapat dibedakan beberapa sub-kelompok lebih kecil.

Pertama, ada plesetan yang hanya 'menjegal' suatu rangkaian tanda (penanda dan makna) yang sudah lazim, tanpa diikuti pembentukan suatu susunan pesan baru yang dari sudut kebahasaan terpadu secara formal. Dengan kata lain, ini adalah jenis *plesetan untuk berplesetan itu sendiri*. Disini bukannya tidak terjadi komunikasi. Kalau tidak terjadi komunikasi maka juga tidak ada yang lucu dan tidak ada yang tertawa. Yang terjadi adalah kenikmatan bermain-main bahasa di dalam bahasa itu sendiri tanpa memperdulikan kaitannya dengan dunia di luar bahasa. Contohnya, pernyataan "air love you ... love you sebelum berkembang ... Umar Kayam?"⁵⁾ Kayam goreng. Ayam goreng to school. Goreng Petruk Bagong

Tidak ada kaitan yang lazim dan langsung antara "air" dan "love you". Juga di antara "love you" dan "sebelum berkembang", atau di antara "ayam goreng" dengan "to school". Tetapi jika masing-masing digabung, orang bisa tertawa apabila mengenali adanya kaitan-kaitan yang tidak lazim atau tidak langsung di antara mereka. Apa artinya tidak langsung disini? Atau apa yang menjadi kaitan perantara itu? Pada kalimat pertama ada kaitan perantara yang menghubungkan-hubungkan "Air" dan "I", tetapi perantara ini tidak tampil di kalimat secara terbuka atau langsung. Ia hadir di benak orang yang terlibat dalam komunikasi plesetan itu. Pada kalimat yang kedua ada kaitan perantara yang menjembatani "love you" dan "layu". Sedang kalimat ketiga dibayang-bayangi kaitan antara "ayam goreng" dan "I am going".

Persoalannya tidak terhenti disitu. Perlu ditegaskan bahwa semua kaitan perantara itu sangat rentan dan bersifat sewenang-wenang. Semuanya hanyalah berlangsung pada aras suara atau audio yang tidak punya sangkut-paut dengan makna atau realitas di dunia obyektif. Makna "Air" tidak punya sangkut paut dengan makna "I", apalagi dengan benda cair atau manusia yang menunjuk diri sendiri. Begitu juga kaitan-kaitan perantara dalam contoh-contoh yang lain. Maka ketika terjadi pencampur-adukan yang tidak terduga antara setiap pasangan itu, kita dapat terhe-nyak sejenak. Ini yang saya maksud dengan tidak ada atau kurang-

nya keterpaduan formal. Berlapis-lapisnya kaitan tak langsung itu dan kurangnya keterpaduan formal tampak lebih menonjol apabila dipertimbangkan bahwa contoh-contoh tadi merupakan campur-aduk yang diramu dari dua sistem bahasa yang berbeda; bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Jenis plesetan yang pertama ini masih punya dua 'saudara' dekat. Boleh dikatakan mereka merupakan sub-kategori dalam kelompok yang sama. Ada satu ragam plesetan yang berusia lebih tua, tidak melulu berpusat di Yogyakarta, dan yang sudah umum kita kenal lewat sejumlah pelawak di panggung hiburan atau acara televisi. Yakni plesetan yang menuntut kemahiran mengundang tawa penonton dengan mendistorsi kata sehingga terbentuk kata-kata lain yang sebenarnya tak punya sangkut-paut atau malahan tak bermakna tetapi kedengarannya lucu. Misalnya 'kepala' menjadi 'kelapa', 'tolong!' menjadi 'lontong', 'airport' menjadi 'air pot' atau 'partisipasi' menjadi 'partisipasi'. Ketika meriah-meriahnya perayaan ulang tahun emas proklamasi kemerdekaan RI, di sebuah warung makan, seorang mahasiswa bernyanyi: "Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah ... hari-hari teh botol ..."

Beberapa plesetan yang menjadi khas para pelawak tersebut dapat dibedakan sedikit dari yang saya golongkan sebagai plesetan Yogya 1990an jenis pertama diatas. Bedanya, plesetan para pelawak ini menampilkan sosok lugu, sok bodoh, *ndesani*, dan konyol. Ini terungkap dari kesan tidak mampu mengucapkan istilah-istilah teknokratik semacam 'partisipasi' dengan benar. Tidak kebetulan banyak sekali pelawak yang tampil di panggung dalam bingkai sebuah cerita, dengan berperan sebagai pembantu rumah tangga. Sedang plesetan jenis pertama yang saya sebut diatas menampilkan sosok kelas menengah (juragan para pembantu itu), yakni berkemampuan bukan menguasai, tetapi memainkan istilah-istilah asing (milik bangsa kolonial atau neo-kolonial) yang sedang bergengsi! Tetapi karena dari segi bentuk kedua kelompok plesetan itu masih relatif mirip, saya tidak memisahkannya menjadi dua jenis.

Dan satu lagi sub-kategori 'plesetan' yang saya anggap masih sekeluarga plesetan jenis pertama. Yakni sejumlah grafiti yang mendistorsikan istilah pribumi menjadi sedikit ke-Barat-Barat-an, tanpa sepenuhnya melenyapkan unsur yang pribumi itu. Semacam penulisan pesan yang sengaja ditumpuki coretan tanda-silang. Misalnya 'Perex' untuk apa yang lazim disebut 'perek' (perempuan eksperimen), 'wedhuz' untuk 'wedus' (Jawa: domba), atau 'ghendenk' untuk 'gendeng' (Jawa: gila). Sejumlah nama tempat, misalnya nama warung 'Takashimura' untuk 'tak kasih murah' (Jawa: saya berikan dengan harga murah) atau 'Niki Echo' untuk 'niki eco' (Jawa: ini lezat) dapat dianggap sebangsa. Nama-nama gang kaum muda atau nama warung seperti ini punya corak selera kelas-menengah kota yang dapat dibedakan dari para pelawak yang membodoh-bodohkan diri untuk melucu itu. Tetapi berbeda dari plesetan kelas menengah yang tersebut pertama, grafiti dan nama-nama gang ini membatasi plesetan pada tipografi satu atau dua kata belaka. Sifatnya lebih dingin, dan serius.

Jenis plesetan yang kedua menjegal suatu kemapanan atau

kelaziman rangkaian pesan, tetapi diikuti dengan terbentuknya sebuah rangkaian pernyataan baru yang mempunyai tingkat keterpaduan formal. Beberapa contohnya disebutkan oleh Budy Wahyono (1991), seorang guru SMTA di Semarang, yang ikut memeriahkan pembahasan tentang plesetan lewat sebuah harian lokal di Yogyakarta: "Tong kosong berbunyi ... glondang!" Saya ingat pernah mendengar seseorang mengubah pepatah "sambil menyelam minum air" menjadi "sambil menyelam minum kopi". Seorang penyiar radio ABC pernah berkomentar: "Kalau orang lain tidak bisa tidur karena minum kopi, saya tidak bisa minum kopi kalau tidur."

Pada contoh pertama diatas yang menjadi sasaran penjejalan oleh kalimat plesetan adalah pepatah, "Tong kosong berbunyi nyaring". Berbeda dari plesetan jenis yang pertama di atas, pada plesetan jenis kedua ini kita mendapatkan kalimat-kalimat baru yang secara relatif dapat dikatakan punya keterpaduan formal. Ia juga dapat dianggap punya 'kebenaran' referensial yang dapat dicari di dunia realitas. Kaitan antara "tong kosong" dan "berbunyi glondang" memang tidak alamiah dan mutlak. Tetapi kaitan di antara mereka jauh lebih dekat ketimbang kaitan di antara "air" dan "love you" atau antara "love you" dan "sebelum berkembang" pada contoh-contoh plesetan jenis pertama. Maka plesetan jenis kedua ini dapat disebut sebagai *plesetan alternatif*, karena ia mengajukan sebuah penalaran atau acuan alternatif terhadap yang sudah atau sedang lazim/dominan/resmi/ dalam masyarakat.

Ada dua sub-kategori yang dapat dimasukkan segolongan dengan plesetan jenis kedua ini. Yang pertama adalah sejumlah praktek berbahasa di antara remaja/pemuda. Misalnya yang dinamakan 'prokem' (Jawa Barat) atau bahasa 'walikan' (Jawa Timur). Bahasa kaum muda ini mengubah penanda, bukan pada makna atau hubungan referensial dengan realitas di luar bahasa. Mirip dengan plesetan jenis pertama, ia mendistorsikan susunan penanda yang sudah lazim. Tetapi berbeda dari plesetan jenis pertama, bahasa bentukan ini tidak dinikmati hanya sebatas distorsi bentuknya itu sendiri, tetapi fungsi praktisnya sebagai penanda yang mengacu pada realitas empirik di luar bahasa.

Ada sub-kategori lain dari plesetan jenis kedua ini. Ia merupakan sub-kategori yang paling ekstrem dari mekanisme kerja plesetan jenis kedua. Contohnya dapat ditemui pada sebagian besar karya-karya sastra dan teater oleh Putu Wijaya. Saya katakan dalam bentuknya yang ekstrem, karena dalam karya-karyanya Putu Wijaya tidak sekedar memberikan lelucon-lelucon kecil seperti apa bunyi alternatif untuk tong kosong. Ia menampilkan persoalan-persoalan kehidupan sosial yang sangat serius. Apa yang serius ini bisa berwajah persoalan 'besar' seperti kekuasaan negara, atau 'kecil' seperti soal orang berpacaran atau kerja rutin seorang pegawai rendahan. Tetapi semuanya serius karena menyangkut kehidupan sehari-hari banyak orang.

Saya beranggapan karya-karya Putu Wijaya masih sekelompok dengan plesetan jenis kedua, karena Putu Wijaya tidak hanya bermain-main dengan kata-kata atau logika dalam dirinya sendiri seperti pada plesetan jenis pertama. Karya-karyanya bukan tidak memperdulikan realitas dunia, dengan berbagai keindahan dan

kebengsekannnya. Ia seringkali menunjukkan bahwa ada banyak yang baik, yang benar, yang pantas dalam kehidupan sehari-hari tetapi selama ini diabaikan, atau dianggap aneh, ekstrem, lucu, atau salah oleh masyarakat yang membaca karya-karyanya. Hal ini tidak selalu dikisahkan secara aneh-aneh, fantastis, surealis, atau anti-realis, misalnya orang mati bisa hidup kembali atau wanita berpayu dara tiga buah. Berbagai kejutan dan plesetan Putu Wijaya bisa tampil dengan cara-cara realis lewat pengkisahkan yang sangat lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang membedakannya dengan novel bercorak 'wayang-plesetan' atau 'wayang-mbeling'⁶⁾ yang pernah ditulis oleh Yudhistira A. Nugraha atau Pipit R. K.

Plesetan jenis ketiga dapat disebut sebagai *plesetan oposisi*, karena ia memberikan nalar dan acuan yang secara konfrontatif bertabrakan atau menjungkir-balik apa yang sudah atau sedang lazim/dominan/resmi/ dalam masyarakat. Sementara sesuatu yang alternatif tidak selalu berwatak oposisional, yang oposisional pasti bersifat alternatif terhadap apa yang lazim. Plesetan oposisi menjegal suatu ungkapan yang sudah lazim, dan menciptakan ungkapan baru yang tidak saja terpadu secara formal dan tidak saja berbeda secara referensial dari yang sudah lazim, tetapi berambisi mengungkapkan makna yang lebih mendekati kebenaran referensial ketimbang ungkapan lama yang sudah terlanjur lebih lazim. Plesetan jenis ini bukan sekedar menggantikan satu tanda/makna dengan tanda/makna lain, tetapi menjungkir-balikkan nilai atau perlawanan frontal terhadap tanda/makna yang lama. Yang biasanya positif menjadi negatif. Yang biasanya terhormat, menjadi tercela. Atau sebaliknya. Yang banyak menjadi sasaran plesetan jenis ketiga ini adalah berbagai singkatan.

Dua contohnya dikutip Budiawan (1994) dari kolomis Eko Budiwardjo (1994): RSS yang biasanya diartikan Rumah Sangat Sederhana menjadi Rumah Sangat Sengsara atau *Raosipun Sumuk Sanget*. IDT yang semula dimaksudkan sebagai singkatan Inpres Desa Tertinggal diplesetkan menjadi *Iki Duite Teko*. Dan tentunya kita sudah sering mendengar bagaimana KUHP yang lazimnya dibakukan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana sering diplesetan menjadi "Kasih Uang Habis Perkara". Kita juga ingat pada tahun 1989 ketika SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) baru saja diluncurkan untuk menggantikan Porkas dan TSSB (1986) serta KSOB (1988), ada yang mengartikan SDSB "Sama Dengan SeBelumnya".

Ketika pemerintah Orde Baru masih gemar mengutuk musuh-musuh politiknya dengan istilah Gerakan Pengacau Keamanan yang disingkat GPK, sejumlah demonstran mahasiswa di Yogyakarta menamakan diri GPK sebagai singkatan Gerakan Penuntut Keadilan (*Suara Merdeka*, 22/09/93, 4). Contoh plesetan terhadap pepatah dari Budhy Wahyono telah dikutip diatas untuk contoh plesetan alternatif. Contoh lain dari orang yang sama menggambarkan plesetan oposisi "Sedikit-sedikit lama-lama jadi ... habis". Ini mengingatkan kita akan penjungkir-balikkan pepatah Jawa "*mangan ora mangan asal kumpul*" (makan atau tidak makan asal berkumpul bersama) menjadi "*kumpul ora kumpul asal mangan*".

Bobot Politik Plesetan

Plesetan seringkali diperdebatkan terutama dalam fungsinya sebagai tanggapan politik kaum yang lemah terhadap tata-sosial dan penguasa yang lalim. Dalam perdebatan semacam itu sering terjadi polarisasi di antara mereka yang meyakini plesetan sebagai senjata ampuh kaum lemah (misalnya Salim, 1991; Wahyono, 1991; Susanto, 1992) melawan mereka yang mengingatkan bahwa plesetan bukanlah senjata perlawanan tetapi hanyalah sebetuk pelarian diri dari kenyataan yang sulit (misalnya Nadjib, 1991; Yuliantoro, 1991). Ada juga mereka yang menempatkan diri di antara kedua ujung itu (misalnya Faruk, 1991; Budiawan, 1991, 1994).

Menurut pengamatan sementara saya, perdebatan semacam itu tidak akan dapat berlangsung dengan lancar atau seru selama belum ada kesepakatan terbatas tentang apa yang dimaksud dengan plesetan itu sendiri. Tentu saja ada banyak pengertian plesetan yang dapat dipilih untuk diperdebatkan. Tetapi batasan dan pilihan pengertian kunci itu mutlak perlu ditegaskan di awal perdebatan. Sayangnya, hal itu tampaknya jarang terjadi. Orang sering berdebat tanpa terlebih dahulu memperhitungkan apakah yang diajak berdebat mempunyai pengertian yang kurang-lebih sama dengan yang dipakainya. Banyak pihak mengasumsikan seakan-akan hanya ada satu pengertian/jenis plesetan, atau mengasumsikan bahwa orang-orang lain yang diajak berbincang mempunyai pengertian yang sama.

Pembedaan variasi plesetan yang saya ajukan diatas mungkin dapat sedikit membantu mengurangi kesalah-pahaman dan kesimpang-siuran dalam suatu perdebatan tentang bobot politik plesetan. Saya katakan hanya 'membantu mengurangi'. Pembedaan di atas masih belum menjamin lancarnya sebuah perdebatan seru tentang pokok itu. Penilaian atas bobot politik suatu plesetan yang serius masih membutuhkan perincian lebih jauh berbagai faktor lain yang ikut berperan, dan pertimbangan atas konteks aktual dari plesetan itu. Dengan kata lain dibutuhkan suatu tinjauan kasus yang mendalam yang bersifat partikular dan konkrit. Bukan-nya perdebatan yang berlangsung di tingkat abstrak dan universal.

Dengan segala kerendahan hati, sebatas kemampuan 'sedikit mengurangi' kemungkinan kebingungan itu tadi, dibawah ini kita dapat simak bagaimana setiap jenis plesetan secara potensial dapat membawa bobot politik. Ketiga kelompok besar jenis plesetan di atas saya bedakan bukan berdasar kadar kelucuannya. Semua bisa sama lucunya. Yang membedakan mereka adalah dua hal ini: (a) kadar keterpaduannya secara formal antara satu tanda dengan tanda lain dalam satu pernyataan, serta (b) bobot referensial atau jarak yang menghubungkan susunan pernyataan itu dengan apa yang dapat dianggap sebagai realitas empirik di dunia nyata yang diacunya. Untuk jelasnya, izinkan saya membuat pengulangan sedikit disini.

Pada plesetan jenis yang pertama (*plesetan untuk berplesetan itu sendiri*) tingkat keterpaduan formal antara penanda-makna-acuan dalam pernyataan yang terbentuk rendah sekali dibandingkan dengan jenis-jenis plesetan yang lain. Yang ada pada

mereka semacam gado-gado tingkat tinggi. Plesetan jenis ini tidak berminat menyampaikan pesan atau komentar apa pun tentang realitas dunia di luar bahasa. Plesetan ini dibentuk terutama sebagai bukti keliaran dan kesewenang-wenangan pembentukan kaitan antara tanda-makna-realitas. Plesetan jenis ini meledakkan fungsi estetik atau puitik dalam bahasa yang dimungkinkan oleh hakekat bahasa itu sendiri.

Plesetan jenis kedua (*plesetan alternatif*) mempertahankan sedikit lebih banyak kadar keterpaduan formal kebahasaan dibandingkan dengan plesetan jenis pertama. Plesetan jenis ini mengacu pada realitas di dunia, yakni pada sisi-sisi lain (*alternatif*) dari realitas di luar bahasa yang sedang atau sudah lazim/dominan/resmi. Acuan alternatif ini mungkin lebih penting sama penting atau tidak sepenting dengan acuan yang sudah lazim/dominan/resmi. Namun, dengan memberikan acuan alternatif, acuan yang lazim/dominan/resmi tidak lagi menjadi acuan tunggal dalam kesadaran masyarakat. Dengan kata lain plesetan alternatif menggugat penunggalan suatu makna yang lazim/dominan/resmi tanpa berusaha meniadakan yang terlanjur lazim/dominan/resmi itu.

Fungsi referensial bahasa justru menjadi bobot utama bagi plesetan jenis ketiga (*plesetan oposisi*). Plesetan jenis ini juga mempertahankan keterpaduan formal ketika menyelewengkan sebuah pernyataan lazim/dominan/resmi. Ia tidak hanya menggubah suatu rumusan pernyataan yang terlanjur lazim, tetapi sekaligus memberikan acuan terhadap realitas dunia yang bertolak-belakang dengan apa yang sudah lazim. Jadi bobot utama plesetan jenis ketiga ini bukan pada kenikmatan bermain-main dengan penanda, atau memberikan kemajemukan nilai alternatif pada acuan realitas, tetapi mengunggulkan suatu nilai-tanding terhadap yang sudah lazim/dominan/resmi dalam masyarakat dan berusaha menyerang yang sudah lazim/dominan/resmi.

Moga-moga pengulangan ini memperjelas implikasi sosial masing-masing, paling sedikit secara abstrak dan potensial. Dalam banyak konteks yang sudah kita kenal plesetan jenis pertama seringkali hanya tampil sebagai hiburan. Tentu saja hiburan bukan barang yang haram. Hiburan bisa menunjang kesehatan. Dalam bentuknya yang paling canggih, plesetan jenis pertama ini tidak hanya lucu tetapi mengandung bobot estetik. Tetapi tidak (secara langsung/formal) berbobot politik.

Dalam kenyataan masyarakat sekarang tidak berlebihan bila ada yang mencurigai plesetan jenis ini sebagai kegemaran orang yang menganggur, iseng atau tidak berdaya. Ia menjadi semacam 'pelarian' dari problema dunia. Ia hanya memainkan gambaran tentang dunia, tanpa berupaya memberikan sumbangan untuk merubah dunia itu supaya lebih baik. Plesetan ini dianggap bisa serius, yakni ketika menjadi komoditi (barang dagangan) dalam industri tontonan hiburan. Tujuan yang dikejar oleh plesetan jenis ini adalah kepopuleran dan tawa para penonton, sesuai dengan tuntutan hukum pasar dan persaingan dagang.

Yang lebih rumit untuk dilakukan secara abstrak begini adalah menilai atau membandingkan bobot politik plesetan alterna-

tif (jenis kedua) dan oposisi (jenis ketiga). Sepintas lalu plesetan oposisi punya tampang lebih garang dan berani menantang kekuasaan ketimbang plesetan alternatif. Tetapi perbandingan ini hanya dapat dibenarkan secara abstrak. Dalam kenyataan konkrit terbuka kemungkinan yang sebaliknya. Mengapa demikian? Plesetan oposisi memang secara langsung menyerang kemapanan dengan menjungkir-balikkan tata-nilai yang ada. Namun dengan tindakan itu, plesetan oposisi masih mempertahankan unsur-unsur yang dijungkir-balik. Cuma status masing-masing unsur yang ditukar. Ia tidak benar-benar transformatif.

Plesetan alternatif memang bertampang lunak dan jinak dibandingkan dengan plesetan oposisi. Apalagi jika plesetan alternatif hanya mempersoalkan bunyi tong kosong. Kalau sebatas ini dia tidak jauh berbeda daripada hiburan ringan seperti plesetan jenis pertama. Namun dalam sosoknya yang radikal, seperti ditunjukkan oleh karya-karya sastra Putu Wijaya, plesetan alternatif bertindak lebih jauh secara politik ketimbang plesetan oposisi. Plesetan alternatif bisa lebih demokratis karena ia berpeluang menggugat dominasi suatu makna/acuan, tanpa membinasakannya. Ia lebih radikal dan inovatif karena bukan sekedar menjungkir-balikkan yang sudah ada, namun memperkenalkan makna/acuan baru atau yang belum banyak dikenal/diakui dalam kesadaran masyarakat.

Dalam plesetan oposisi, yang jahat pada pengertian lazim/dominan/resmi dijungkir-balik menjadi pahlawan dan yang biasanya dimuliakan dijungkir-balik menjadi terhina. Plesetan jenis ini dengan tegas bersifat hitam-putih, menarik garis tegas antara lawan dan kawan. Wataknya heroik dan tegas-tegas politis dalam pengertian yang paling vulgar. Dalam plesetan alternatif, seperti ditunjukkan oleh Putu Wijaya, pertentangan antara penjahat/pahlawan atau kawan/lawan dicairkan, dibaurkan, atau diaduk-aduk. Tidak jelas lagi mana yang baik/buruk atau kawan/lawan. Plesetan ini lebih bersifat anarkis. Ia tidak berlagak heroik. Ia berbobot politik radikal, walau (atau justru karena) kepolitikannya tidak kelihatan gamblang.

Sekali lagi saya ingin mengutip pengakuan Putu Wijaya sendiri, walau seperti sudah saya katakan kita tidak perlu langsung mempercayai pengakuan penulis atas karyanya. Menurut pengamatan saya pengakuan berikut ini telah terbukti bukan saja dalam karya-karya Putu Wijaya yang sudah ditulisnya, tetapi juga yang ditulis beberapa tahun kemudian:

Saya ingin orang melihat lagi alternatif untuk memilih dan kemudian memilih sendiri untuk dirinya berdasarkan citra masing-masing. ... Saya memilih ... Yang tidak diutak-atik orang lain. supaya mau menyangsikan lagi segala sesuatu. Saya memancing dan merangsang ... kemudian mengelak, karena bukan pendapat saya yang penting ... (1982:305)

Bila dikaitkan dengan masalah kebahasaan, sikap politik plesetan alternatif ala Putu Wijaya ini boleh jadi yang paling radikal. Ia berangkat dari kesetiaan kepada prinsip yang paling

mendasar dari hakekat bahasa: yakni kaitan antara tanda-makna-realitas sepenuhnya bersifat sewenang-wenang. Juga bila menyangkut penilaian baik/buruk atau penjahat/pahlawan. Disini tidak ada yang obyektif, alamiah, atau representatif secara tegas. Saya katakan ia 'boleh jadi yang paling radikal', karena kepastian untuk penilaian demikian masih ditentukan oleh banyak faktor lain yang tidak dapat dibahas panjang-lebar disini.

Dalam tradisi budaya politik di Eropa dikenal aliran Bakhtin yang dekat dengan sikap politik Putu Wijaya. Bedanya, aliran Bakhtin tidak mau terhanyut dalam relativisme yang seakan-akan dapat diperpanjang tanpa batas sebagaimana mewarnai strategi Putu Wijaya. Relativisme yang mutlak tidak lagi menjadi relativistik. Dalam aliran Bakhtin, kesewenang-wenangan bahasa tidak sama dengan acak. Ia sewenang-wenang dalam sebuah lingkungan, tetapi senantiasa mengejawantahkan diri dalam bentuk-bentuk konkrit yang khusus dan punya watak ideologis. Inilah sebagian dari yang pernah ditulis Bakhtin dalam sebuah versi terjemahan bahasa Inggrisnya:

But no living word relates to its object in a singular way: between the word and its object, between the word and the speaking subject, there exists an elastic environment of other, alien words about the same object, the same theme, and this is an environment that it is often difficult to penetrate. It is precisely in the process of living interaction with this specific environment that the word may be individualized and given stylistic shape. (1981:276)

Kasus-kasus Kesewenangan

Dalam abad 20 ini marxisme dan post-strukturalisme merupakan dua isme yang pernah akrab dengan gerakan aktivisme politik dan budaya di dunia. Keduanya relevan disebutkan disini, karena marxisme mempunyai wawasan yang sangat dekat dengan plesetan oposisi. Sedangkan post-strukturalisme dekat sekali dengan plesetan alternatif gaya Putu Wijaya. Hal ini perlu disebutkan sekedar untuk mengingatkan bahwa plesetan merupakan sebuah gejala bahasa yang sangat universal. Tidak khas Jawa. Dalam acara tanya-jawab menyusul penyampaian makalah Budi Susanto pada Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya kelima, banyak hadirin menyebutkan contoh-contoh plesetan di berbagai tempat lain di luar Jawa (1992: 63-65).

Plesetan bukan sebuah lelucon atau kenakalan yang iseng semata-mata. Dekonstruksi yang dikembangkan sejumlah filosof Eropa merupakan hasil serius dari upaya menjelajahi implikasi paling jauh dari kesewenang-wenangan bahasa (tanda/makna/realita). Dari mereka kita dapat belajar banyak hal, dan sebagian di antaranya perlu disinggung disini biar pun selintas.

Puncak-puncak cemerlang dalam peradaban manusia dicapai bukan tanpa jasa kesewenang-wenangan bahasa (tanda/makna/reali-

ta). Setiap bentuk ketertiban dan tata-sosial hanya dapat dimungkinkan oleh stabilitas sebetulnya kesewenang-wenangan yang tidak dikenali lagi sebagai kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan itu tampil seakan-akan rasional, realis, alamiah, atau obyektif. Yang berbeda dari semua itu dianggap sebagai kelainan, penyimpangan, kecelakaan, kegilaan, atau lelucon. Plesetan adalah salah satu contohnya. Demikianlah berbagai identitas sosial seperti menjadi orang 'Indonesia', atau 'Timur', atau 'perempuan', atau 'Jawa', atau 'pribumi', atau 'Komunis', atau 'Kristen' telah diteguhkan dengan cara-cara yang sewenang-wenang. Dan berdasarkan semua itu sebuah tata-tertib dan tata-sosial dipertahankan.

Sebuah sejarah dapat ditulis berpanjang lebar untuk menggambarkan bagaimana kesewenang-wenangan itu dibikin, disangkal, dan kemudian berhasil dimapankan dengan berbagai pengorbanan pihak yang dirugikan dan rezeki bagi yang diuntungkan. Semua itu berlangsung di depan mata para ahli bahasa, tanpa banyak komentar dan intervensi dari mereka yang lebih sibuk dengan mengotak-atik awalan, atau bentuk-bentuk kalimat majemuk, dan pengIndonesiaan nama-nama asing pada merek dagang di Jakarta. Untuk keperluan kita sekarang disini, saya hanya akan menyebutkan beberapa contoh kasus 'kecil' yang paling mutakhir di negeri ini.

Pada saat naskah awal tulisan ini masih saya susun, nasib sejumlah warganegara Indonesia sedang dipertaruhkan gara-gara kesewenang-wenangan pemaknaan bahasa (yang tidak dapat dilepaskan dari kesewenang-wenangan praktek kekuasaan politik). Di Pengadilan Negeri Sleman (DIY) seorang paranormal diadili karena dalam ceramahnya setahun sebelumnya ia menggunakan istilah yang dianggap tidak tepat/pantas. Dalam sidang kesebelas, pengadilan atas dirinya mempersoalkan apa persisnya makna kata 'diktor' dan 'otoriter'. Pada waktu yang hampir bersamaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang berlangsung tiga pengadilan terpisah, namun semuanya menyangkut pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah atau pejabatnya. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berlangsung sidang gugatan dari Teater Buruh Indonesia yang mengalami kesulitan mementaskan pertunjukan teater dari Direktorat Sosial Politik DKI Jakarta. Yang menjadi alasan adalah digunakannya istilah 'buruh' pada nama grup teater itu dan istilah 'terpuruk' pada judul pementasan. Di Cimindi (dekat Bandung) sejumlah penjual bakso diinterogasi pejabat polisi dan militer, gara-gara salah seorang dari mereka menulis grafiti berbunyi "PKI Madiun Bangkit" sebagai bagian dari hiasan perayaan hari ulang tahun proklamasi RI ke 50.

Kalau mau sedikit diperluas, boleh dikatakan bahwa sejak tahun 1989 terjadi panen paling meriah dalam pengadilan atas para aktivis muda Indonesia dengan menggunakan pasal-pasal penghinaan terhadap pejabat negara. Yakni pasal-pasal warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang dulu bernama *haatzai artikelen*. Pada tahun 1989 itu seorang aktivis mahasiswa Jakarta, enam orang aktivis mahasiswa Bandung, dan dua pemuda Yogyakarta ditangkap, ditahan, diadili dengan pasal-pasal pernyataan penghinaan dalam berbagai kasus yang berbeda. Pada tahun 1991 seorang aktivis LSM dari Salatiga didakwa melanggar pasal yang sama. Tahun berikutnya pasal-pasal yang sama memangsa dua mahasiswa

Semarang. Tahun 1993 yang menjadi korban adalah seorang aktivis LSM Semarang dan 21 mahasiswa dari berbagai kota. Dalam beberapa bulan ini, nama-nama seperti Arief Budiman, George Junus Aditjondro, Sri Bintang Pamungkas, dan Abdurachman Wahid adalah sebagian dari orang-orang yang disorot karena kasus-kasus pernyataan yang dituduhkan menghina pihak lain.

Jelas kita tidak membutuhkan daftar yang lengkap. Apa yang sudah disebutkan diatas sekedar menunjukkan betapa serius dan meluas persoalan batasan makna 'menghina' atau 'tidak menghina' dalam kehidupan berbahasa di Indonesia masa ini. Sedikit di bawah seriusnya batasan makna 'bersih lingkungan' atau 'tidak bersih lingkungan'. Dan semua itu berlangsung, sejauh saya amati, tanpa perhatian dan keperdulian dari para ahli bahasa kita yang setiap tahun mengadakan berbagai pertemuan tingkat tinggi tentang kebahasaan!') Sebagian dari kasus-kasus hukum itu malahan secara langsung berurusan dengan soal plesetan. Misalnya kasus pentas panggung hiburan oleh dua pemuda di Yogyakarta serta dua pemuda lain di Salatiga, serta dua mahasiswa di Semarang (semuanya terjadi pada tahun 1992), pada demonstrasi SDSB di Jakarta yang memakan korban Nuku Sulaiman (1993/4), dan ceramah akademik di sebuah kampus di Yogyakarta yang memangsa George Junus Aditjondro (1994/5).

Apakah ini sebetulnya ketidak-perdulian para ahli bahasa kita? Mungkin. Jika ya apakah ketidak-perdulian ini semata-mata disebabkan oleh kesadaran mereka akan seriusnya ancaman hukuman dibalik kajian tentang plesetan? Tampaknya tidak. Apakah persoalannya hanya sekedar karena ketakutan yang berlebihan terhadap tahayul yang tidak nyata? Juga tidak. Saya bercuriga persoalannya jauh lebih serius, mendasar, sistemik dan punya sejarah yang panjang. Ada semacam tembok-tembok kukuh yang akan menyulitkan para ahli bahasa kita untuk menggumuli persoalan-persoalan bahasa yang hidup dalam masyarakatnya. Pendidikan bahasa di masyarakat kita secara menyeluruh cenderung mengasingkan kita dari gejolak masyarakat kita sendiri.

Untuk sedikit menjelaskan yang saya maksudkan, sekaligus sebagai penutup, berikut ini saya kutip kembali apa yang pernah saya tulis di dalam sebuah makalah untuk memperingati Bulan Bahasa tahun 1993.⁸⁾

Sejarah kajian ilmiah tentang bahasa di Indonesia pada intinya dan secara kasaran dapat dikatakan sebagai sejarah pelecehan terhadap bahasa. Pada pokoknya, bahasa diperlakukan pertama-tama dan yang terutama sebagai "alat" atau instrumen. Lebih tepatnya lagi sebagai "alat komunikasi".

Sebagai alat, bahasa pada hakekatnya dianggap bersifat netral. Ia baru bersifat baik atau tidak baik dalam praktek penggunaannya oleh pihak (agen) tertentu. Dengan demikian, dalam pandangan instrumentalis ini, si pengguna adalah subyek-subyek yang merdeka dan dengan bebas bisa menunggangi, memperalat, menjungkir-balikkan, atau secara kreatif menyusun bahasa indah.

Sebagai alat, harga bahasa ditentukan oleh nilai-

gunanya. Biasanya, walau tidak hanya, ini berarti kegunaan teknis-pragmatik-ekonomis. Dalam lingkungan sosial yang terkena demam Pembangunan, bahasa yang dianggap baik adalah bahasa yang rasional, logis, sistematis, terpadu, hemat, standar. Singkatnya, bahasa yang baik adalah bahasa yang sangat kekar tetapi patuh (seperti matematika, mesin, buruh, atau anggota militer).

.
Tidaklah aneh jika wawasan bahasa yang instrumentalis-demi-Pembangunan seperti itu baru dijumpai sebagai gejala besar pada masa bangkitnya kekuasaan sosial yang bernama Kolonialisme, yang pada gilirannya merupakan kerabat-kerja Kapitalisme.

Dalam masyarakat pra-kolonial dan pra-kapitalis, bahasa tidak pernah dilecehkan secara sekuler sekedar sebagai "alat komunikasi". Tetapi dalam masyarakat ini bukannya tidak ada masalah keterasingan manusia. Bukan-nya bahasa itu dilecehkan, tetapi sebaliknya justru dipuja-puja dan ditakuti. Bahasa tidak di-manusiawi-kan atau di-sosial-kan. Terjadi "mistifikasi" mengenai kekuatan magis kata-kata lisan atau pun tulisan: bobot nama, nama keramat, mantera, aksara bertuah, dsb. (hal. 2)

.
Kekuasaan dalam modernitas dibentuk dengan mengarahkan ilmu pengetahuan (khususnya ilmu alamiah, matematika, teknik, ekonomi) dan aparatus represi (hukum, militer, polisi) untuk mengendalikan alam dan masyarakat atas nama "stabilitas dan keamanan". Mereka sangat takut, curiga dan anti kepada apa pun yang bersifat terbuka, majemuk, penuh kemungkinan.

Baik ilmu modern yang instrumentalis, tata-politik negara yang legalistik mau pun militerisme yang represif mendambakan kepastian dan stabilitas. Keduanya merupakan prakondisi bagi pengawasan, pengendalian, penguasaan, dan penjajahan. Karena itu ilmu, politik dan militerisme sangat akur dalam Pembangunan di berbagai negara sesudah Perang Dunia II. Salah satu agenda kerja utama mereka ialah menindas ambiguitas, keterbukaan, dan kemajemukan makna-makna dalam bahasa. Apalagi dalam sastra. Makna diusahakan agar bersifat tunggal dan baku. (hal. 7)

Jika pengamatan diatas tidak terlalu keliru, maka bukanlah hal yang aneh bila kerapian, keutuhan, dan puritanisme menjadi masalah-masalah yang diutamakan dalam kerja para ahli bahasa kita masa kini. Tidak mengherankan bila pelecehan bahasa semacam itu justru dipahami sebagai sikap ilmiah yang terhormat, jika bukan kecintaan patriotik kepada Pembangunan bangsa. Sedang plesetan dimusuhi sebagai "pelecehan bahasa" yang "berbahaya" seperti dijelaskan oleh seorang Direktur Akademi Bahasa dalam pidato resmi di forum akademik baru-baru ini (*Suara Merdeka*, 03/08/95, 3). *****

Catatan

(1) Budi Susanto dengan jitu berpendapat bahwa persoalan 'agen' (siapa yang membuat pernyataan) tidak seharusnya ditekankan dalam memahami plesetan (1992: 62). Katanya lebih tegas, "plesedan itu mungkin terjadi karena hakikat bahasa itu sendiri" (1992:63). Maka ini berarti, tidak penting siapa yang berplesetan, apakah itu orang Jawa atau bukan. Namun sayang pokok terpenting ini justru tidak diberi penjelasan atau argumen lebih jauh oleh Budi Susanto. Pokok itu hanya muncul selintas dalam acara tanya-jawab, bukan bagian dari makalah yang disampaikan dalam Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya Kelima. Ironisnya pula makalahnya sendiri membahas hal-hal yang seakan-akan khas Jawa.

(2) Lihat kumpulan tulisan oleh orang-orang Indonesia tentang post-modernisme dan post-strukturalisme yang dihimpun Suyoto dkk. (1994). Perlu diakui pula, wawasan tersebut telah membantu penulis untuk menyusun tulisan ini.

(3) Lihat misalnya *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988) yang diterbitkan oleh Balai Pustaka.

(4) Lihat dua pengertian yang ditawarkan kamus Horne (1974).

(5) Contoh-contoh ini saya ambil dari tulisan Hairus Salim (1991) dan Emha Ainun Nadjib (1991).

(6) Patut diingat bahwa di satu pihak, komentar tentang karya-karya Putu Wijaya disini tidak berlaku secara umum untuk semua karyanya. Di pihak lain, kehebatan beberapa karya Putu Wijaya jauh lebih luas dan kompleks daripada yang disebutkan dalam dua alinea pendek ini. Disini kita tidak membahas karya-karya Putu sebagai pokok utama, namun sejauh karya-karyanya punya beberapa unsur yang bisa menjadi contoh kecil untuk pokok bahasan kita tentang plesetan. Karena itu rincian yang lebih tepat tidak saya berikan disini.

Biasanya kita tidak perlu terlalu peduli dengan apa kata seorang pengarang tentang karyanya. Tetapi tidak ada jeleknya jika pengakuan Putu Wijaya tentang proses kreatifnya dikutip sebagai catatan-akhir: "Saya memilih hal yang kecil-kecil. Yang lucu tapi unik." (1982:305).

(7) Sejak tahun 1989 saya telah berkali-kali diminta terdakwa dan penasehat hukum pada beberapa kasus itu untuk tampil di sidang pengadilan sebagai saksi ahli (bahasa). Permintaan itu saya terima sebagai kehormatan bukan saja kepada saya pribadi, tetapi juga ilmuwan bahasa. Sayang hampir selalu majelis hakim menolak apa yang menjadi hak terdakwa sebagaimana dilindungi KUHAP. Sejauh pengamatan saya Drs. Lukman Hakim merupakan orang pertama yang diizinkan pengadilan di Indonesia untuk memberikan kesaksian

sebagai ahli bahasa dalam sidang yang memeriksa kasus penghinaan di Pengadilan Negeri Sleman (8 Agustus 1995) seperti saya sebutkan diatas. Dua minggu berikutnya saya diizinkan tampil sebagai saksi ahli-bahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(8) Makalah berjudul "Bulan Bahasa di Tahun Postmodernisme" untuk Sarasehan Bahasa dan Sastra Indonesia yang diadakan oleh Balai Penelitian Bahasa, Yogyakarta, 21 Oktober 1993. Acuan halaman pada kutipan ini bersumber dari naskah yang asli. Makalah ini disunting dan diperpendek oleh redaksi *Republika* yang memuatnya dalam edisi 26 dan 27 Oktober 1993 harian tersebut. Hasil gubahan redaksi *Republika* ini kemudian diterbitkan-ulang dalam buku yang disusun oleh Suyoto dkk. (1994: 175-185).